

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR: 001/KP.01.00/GO/01/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI, BAWASLU KOTA GORONTALO, BAWASLU
KABUPATEN GORONTALO, BAWASLU KABUPATEN BOALEMO, BAWASLU KABUPATEN
POHUWATO, BAWASLU KABUPATEN BONE BOLANGO DAN BAWASLU KABUPATEN
GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) pada Sekretariat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota Gorontalo, Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Bawaslu Kabupaten Boalemo, Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah habis masa kontraknya sehingga dipandang perlu untuk mengangkat/mempekerjakan kembali setelah dilakukan evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil Evaluasi, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-115.01.2.686438/2022 tanggal 17 November 2021.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 3388/KP.01.00/SJ/12/2021 tertanggal 28 Desember 2021 Perihal Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Bawaslu Tahun 2021;
 2. Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 110/KP.08.01/GO-03/12/2021 tertanggal 29 Desember 2021 perihal Hasil Evaluasi PPNPNS di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Tahun 2021;
 3. Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo Nomor 025/KP.08.01/GO-06/12/2021 tertanggal 29 Desember 2021 Perihal Hasil Evaluasi PPNPNS di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo Tahun 2021;
 4. Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boalemo Nomor 51/KP.08.01/GO-01/12/2021 tertanggal 29 Desember 2021 Perihal Laporan Hasil Evaluasi PPNPNS di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boalemo Tahun 2021;
 5. Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pohuwato Nomor 047/KP.08.01/GO-05/12/2021 tertanggal 29 November 2021 Perihal Hasil Evaluasi PPNPNS di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pohuwato Tahun 2021;
 6. Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bone Bolango Nomor 036/OT.02/GO-02/12/2021 tertanggal 29 Desember 2021 Perihal Laporan Evaluasi PPNPNS di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021;
 7. Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 07/KP.08.01/GO-04/12/2021 tertanggal 28 Desember 2021 Perihal Hasil Evaluasi PPNPNS di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI, BAWASLU KABUPATEN GORONTALO, BAWASLU KOTA GORONTALO, BAWASLU KABUPATEN BOALEMO, BAWASLU KABUPATEN POHUWATO, BAWASLU KABUPATEN BONE BOLANGO DAN BAWASLU KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.**
- PERTAMA :** menetapkan nama-nama yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) pada Sekretariat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Bawaslu Kota Gorontalo, Bawaslu Kabupaten Boalemo, Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA :** Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagaimana Diktum PERTAMA berkewajiban:
1. Melaksanakan Tugas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.
 2. Mempunyai Integritas, Pribadi yang kuat, Jujur dan Adil.
 3. Bertanggung jawab penuh atas tugas-tugas yang sudah ditetapkan.
 4. Taat terhadap disiplin jam masuk kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.
 5. Dapat bekerja sama yang baik dengan semua Pegawai dilingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo.

6. Melaksanakan Tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan/Pimpinan.
7. Tunduk dan patuh pada seluruh peraturan perundang-undangan yang mengikat Pegawai Bawaslu.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul karena ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Gorontalo
Pada tanggal : 3 Januari 2022
KEPALA SEKRETARIAT,

NIKSON ENTENGO, S.IP., M.Si
NIP. 19791122 200212 1 008

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo
 Nomor : 001/KP.01.00/GO/01/2022
 Tentang : Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota Gorontalo, Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Bawaslu Kabupaten Boalemo, Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2022.

**DAFTAR NAMA-NAMA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI, BAWASLU KOTA GORONTALO,
 BAWASLU KABUPATEN GORONTALO, BAWASLU KABUPATEN BOALEMO,
 BAWASLU KABUPATEN POHUWATO, BAWASLU KABUPATEN BONE BOLANGO DAN
 BAWASLU KABUPATEN GORONTALO UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Bawaslu Provinsi Gorontalo

NO	NAMA	BAGIAN
1	Norpin Ahmad, S.IP	Administrasi
2	Awan Abdullah	Administrasi
3	Adityo Setiawan Ibrahim, S.AP	Administrasi
4	Ahmad Polamolo, S.E	Administrasi
5	Ibnu Lawani	Administrasi
6	Mustika Hidayat Al Anshori. S.Kom	Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
7	Ahmad Ali, S.Kom	Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
8	Roy Hamrain, M.H	Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
9	Armin Nur, S.Hi	Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
10	Ismi Febrina Mustafa, S.H	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum
11	Didit Suhandono, S.H	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum

2. Bawaslu Kabupaten Gorontalo

NO	NAMA	SUB BAGIAN
1	Hadijah Hamzah, S.H	Administrasi
2	Meryani Raisa Adiyanti Mootalu, SE	Administrasi
3	Verawati Abubakar, S.Kom	Administrasi
4	Stenly Tinduku, S.Kom	Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
5	Jefri Fernando A. Hamzah	Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
6	Hidayat D. Hasan, S.H	Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
7	Noval Katili, S.H	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum
8	Subarkah Komendangi, S.H	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum

3. Bawaslu Kota Gorontalo

NO	NAMA	SUB BAGIAN
1	Farida Muhsin	Administrasi
2	Rofiudin Jr. Tilome, S.E	Administrasi
3	Sriyanti Lasindrang	Administrasi
4	Ikbal Arbie, S.Si	Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
5	Moh. Fahmi Kasim, S.Pi	Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
6	Ikrar Setiawan Akasse, S.H	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum
7	Vidya Gumanti, S.Hi	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum

4. Bawaslu Kabupaten Boalemo

NO	NAMA	SUB BAGIAN
1	Fitriyanti T. Pakaya, S.KM.,M.Si	Administrasi
2	Moh. Reza Firmansyah Sofyan, S.Kom	Administrasi
3	Anwar Hasan, S.H	Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
4	Laylatul Munawaroh, S.I.Kom	Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
5	Nolvionita Sofyan, S.H	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum
6	Aldiyanto Ahmad, S.H	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum
7	Yahya Karuana, S.H	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum

5. Bawaslu Kabupaten Pohuwato

NO	NAMA	SUB BAGIAN
1	Fitriani Abdul Azis, S.Kom	Administrasi
2	Indrawaty Saleh, S.P.d	Administrasi
3	Kasim Yanu, S.I.P	Administrasi
4	Indah Rasid	Administrasi
5	Noldi K. Mohi, S.E	Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
6	Alfris Podungge, S.H	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum
7	Mahmud Diko, S.H	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum

6. Bawaslu Kabupaten Bone Bolango

NO	NAMA	SUB BAGIAN
1	Ruliyanto Lantu	Administrasi
2	Ika Mariana Maksud, S.H	Administrasi
3	Nindi Mokodompit	Pengawasan dan Hubungan Masyarakat
4	Agus Laingo, S.AP	Pengawasan dan Hubungan Masyarakat
5	Hedy Fauzi Amrullah, S.Kom	Pengawasan dan Hubungan Masyarakat
6	Ronal Husain, S.H	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum

7	Narti Harun, A.Md	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum
8	Lukman Ismail, S.H., M.H	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum

7. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara

NO	NAMA	SUB BAGIAN
1	Ida Royana, S.E	Administrasi
2	Sri Mahdalona Machmud, S.H	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum
3	Rizal Tongkodu, S.H	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum
4	Amrain U. Koli, S.Pd	Pengawasan dan Hubungan Masyarakat
5	Alyasin Tarib, S.I.P	Pengawasan dan Hubungan Masyarakat
6	Rizq Menashar, S.H	Pengawasan dan Hubungan Masyarakat

Ditetapkan : di Gorontalo
Pada tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA SEKRETARIAT,

NIKSON ENTENGO, S.I.P., M.Si
NIP. 6901122 200212 1 008